



Evaluasi Program Pendataan Nasional Menuju Indonesia Digital 2045

M. Akbar Ichtiar

Universitas Teuku Umar
e-mail: akbarichtiar@utu.ac.id

Nodi Marefanda

Universitas Teuku Umar
e-mail: nodimarefanda@utu.ac.id

Abstract

This research aims to evaluate the policy implementation of the One Data Marine and Fisheries Program “(Satu Data-KP)” and its relevance to the efforts towards realizing Digital Indonesia 2045. This study employs a qualitative method with a descriptive approach and was conducted in Aceh Province. Data collection utilized observation, interviews, documentation, and audiovisual records. The collected data were subsequently analyzed using methods of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research critically assesses the program's level of Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, and Appropriateness. The findings indicate that, in terms of data collection, the program has had a positive impact on decision-making and enhanced service efficiency. However, the program still presents fundamental shortcomings, such as the limited scope of digital transformation being undertaken and the minimal effort to enhance community readiness toward an inclusive, empowering, and sustainable Digital Indonesia.

Keywords: Policy Evaluation; Satu Data-KP Program; Digital Indonesia 2045.

A. Pendahuluan

Digitalisasi merupakan era dimana proses pengintegrasian teknologi digital untuk memudahkan pekerjaan terjadi secara masif. Di Indonesia, proses ini berkembang sangat pesat sejak diterapkannya sistem Working From Home (WFH) sebagai akibat dari pembatasan mobilisasi demi mengakhiri pandemi Covid-19 (Rachmawati et al., 2021; Agostino et al., 2020). Penggunaan sistem digitalisasi terakselerasi hampir di setiap sektor kehidupan mulai dari pendidikan, bisnis, kesehatan, hingga sektor kelautan dan perikanan. Dampaknya, setiap pihak seolah “dipaksa” untuk bertransformasi tanpa diberikan waktu yang cukup untuk beradaptasi sehingga mengharuskan pemerintah untuk sigap dalam menghadirkan solusi.

Pemerintah telah merilis peta jalan Making Indonesia 4.0 pada April 2018 lalu sebagai penentu arah bagi Indonesia untuk menjadi negara yang siap untuk menyambut era revolusi industri 4.0 yang merupakan era-nya digitalisasi. Kemudian, pemerintah mempertegas keseriusannya dengan menghadirkan Perpres No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government). Teranyar, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika merilis Peta Jalan Indonesia Digital 2045 yang menekankan pentingnya pembangunan digital yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan.

Di sektor Kelautan dan Perikanan (KP), pemerintah pada tahun 2017 telah terlebih dahulu menghadirkan inovasi digital berupa program “Satu Data-KP”. Program yang dipayungi hukum PerMen-KP NO. 67 Tahun 2017 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan, yang kemudian diperbaharui menjadi PerMen-KP Nomor 61 Tahun 2020 ini merupakan program pengelolaan data bersifat digital yang bertujuan untuk menyederhanakan proses pendataan dengan cara menghimpun data hanya pada 1 sistem utama saja. Ruang lingkup program Satu Data-KP diantaranya data perizinan, data pegawai, data administrasi, data anggaran, data pengawasan, data Kartu Pelaku Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan (KUSUKA), data bantuan pemerintah, data produksi, hingga data lainnya.

Program yang kemudian diadopsi dan diperluas cakupannya melalui Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia ini bertujuan untuk menghadirkan kemudahan baik bagi pemerintah dalam upaya menghadirkan pelayanan yang tepat sasaran maupun bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan melalui pemanfaatan data. Hal tersebut dikarenakan pendataan merupakan kegiatan yang sangat fundamental di era digital. Basis data yang valid sangat diperlukan oleh pemerintah dalam pengambilan keputusan yang tepat dan berkeadilan.

Sebaliknya, tanpa adanya pendataan yang baik maka akan berdampak langsung terhadap buruknya kualitas pengambilan keputusan serta pelayanan publik yang dihadirkan (Pittaway & Montazemi, 2020)

Kehadiran program pendataan nasional yang dapat menghimpun dan mengintegrasikan data sangat dibutuhkan untuk meraih pemerintahan yang cepat tanggap dalam menyelesaikan berbagai persoalan serta memenuhi tuntutan publik akan peningkatan kualitas pelayanan (Mutiarin et al., 2024). Oleh sebab itu, langkah yang diambil oleh pemerintah dalam menyiapkan berbagai regulasi termasuk peta jalan yang memuat strategi dirasa sudah tepat. Namun, hal tersebut tentunya membutuhkan penilaian lebih lanjut oleh publik untuk menguji sejauh mana tingkat efektivitas langkah yang telah diambil. Hal tersebut kemudian menghadirkan pertanyaan terkait apakah program pendataan yang dijalankan berdampak langsung terhadap kemajuan system administrasi negara serta peningkatan taraf hidup masyarakat yang ada di dalamnya?. Oleh sebab itu, melalui tulisan ini penulis ingin mengkaji kembali proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah khususnya Program Satu Data-KP dengan menggunakan indikator evaluasi kebijakan menurut (Dunn, 2003) dalam (Tresiana & Duadji, 2019) guna melihat sejauh mana tingkat keberhasilan pendataan dari program nasional ini dan apakah program tersebut dapat menunjang pencapaian visi Indonesia Digital 2045

B. Metode penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Aceh. Lokus tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan aksesibilitas daerah terhadap perangkat teknologi informasi serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini digunakan memahami fenomena sosial yang kompleks secara detail melalui penginterpretasian data lapangan yang bersifat deskriptif untuk menjadi suatu nilai/makna (Sugiyono, 2019). Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, serta dokumen audio-visual. Data tersebut kemudian dianalisis secara konstan sebagaimana pendapat Nasution (1988) dalam (Sugiyono, 2019) yang menyatakan bahwa proses analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai sejak penentuan masalah, berlanjut ke proses pengumpulan data di lapangan, hingga perumusan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Miles dan Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2019) yang terdiri dari 3 proses utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna menganalisis data penelitian yang telah didapatkan.

Selanjutnya, kredibilitas data diuji dengan memperpanjang pengamatan dan meningkatkan ketekunan. Perpanjangan pengamatan dilakukan dengan tujuan menghadirkan kredibilitas data yang mumpuni melalui proses kembali ke lapangan untuk mengkonfirmasi informasi yang sedang/telah diteliti. Sedangkan peningkatan ketekunan merupakan kegiatan pengamatan secara mendalam dengan lebih teliti dan berkelanjutan. Kegiatan ini bukan hanya menganalisa hasil penelitian secara eksplisit namun juga mengkaji makna implisit dibalikinya sehingga dapat disajikan deskripsi data yang sistematis dan kredibel (Sugiyono, 2019).

C. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan Program Satu Data-KP Kelautan dan Perikanan di Provinsi Aceh sudah berjalan dengan baik jika ditinjau dari segi pendataan. Kinerja pelaksana pendataan dapat dilihat langsung dari *website* resmi pemerintah melalui laman *portaldata.kkp.go.id*. Adapun beberapa jenis data yang tersedia diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Data Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh Tahun 2023

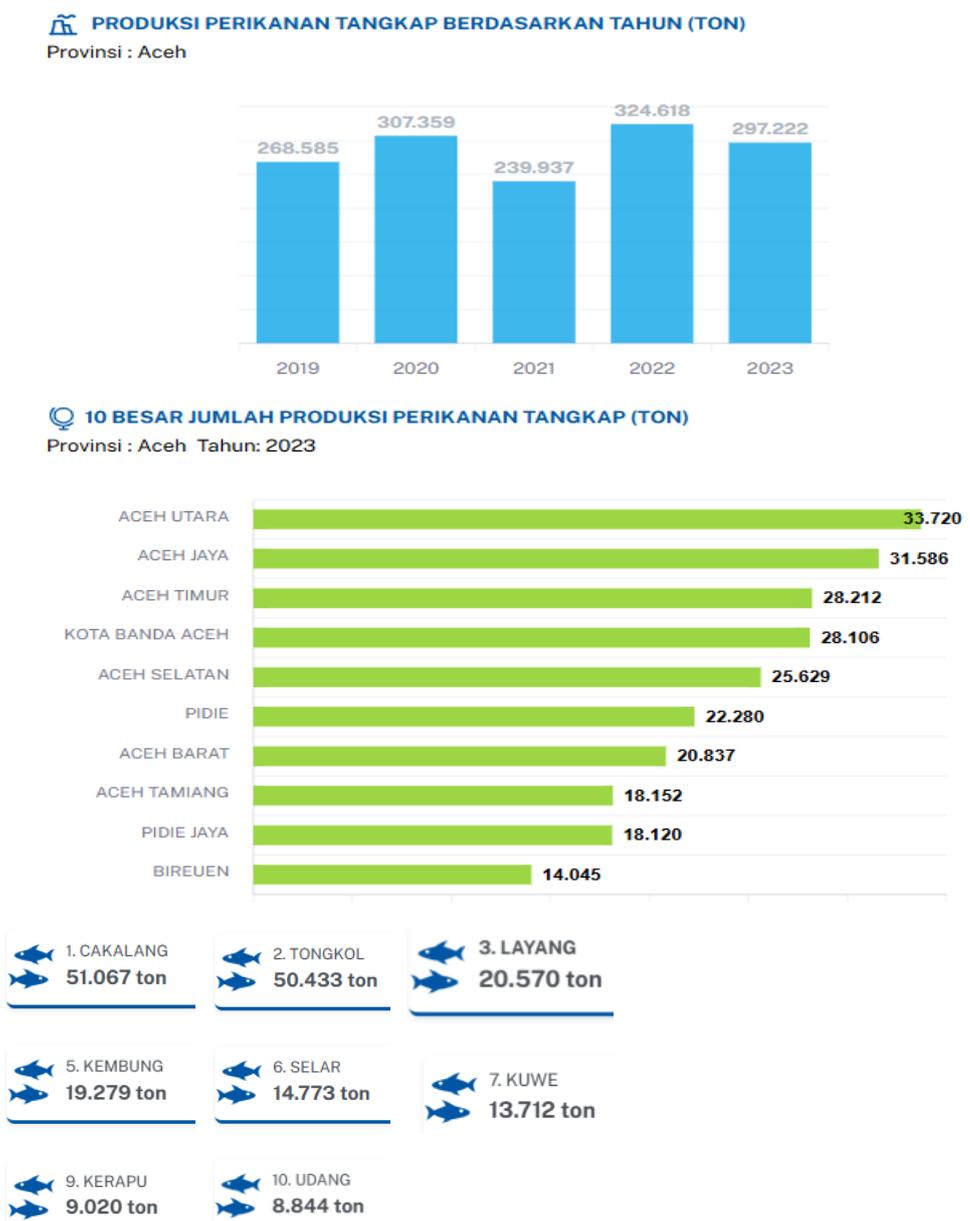
No	Jenis Data	Jumlah	Jenis Data
1	Perikanan Tangkap	297.222 Ton	Data Produksi
2	Budi Daya Pembesaran	103.815 Ton	
3	Budi Daya Pembenihan	1.662.608 Ekor	
4	Budi Daya Ikan Hias	102.840 Ekor	
5	Garam	9.234 Ton	
6	Nelayan	104.488 Orang	Data Profesi
7	Pembudidaya Ikan	85.915 Orang	
8	Kusuka (2024)	62.600 Orang	Data lainnya
9	Kapal (2023)	27.787 Unit	

Sumber: Portal Data Kementerian Kelautan dan Perikanan

Tabel 1 menunjukkan rekapitulasi data kelautan dan perikanan di Provinsi Aceh tahun 2023 yang mencerminkan potensi sekaligus kekuatan sektor ini bagi perekonomian daerah. Dari sisi **produksi**, perikanan tangkap menempati posisi dominan dengan total 297.222 ton, disusul oleh budidaya pembesaran sebesar 103.815 ton. Selain itu, sektor pembenihan menghasilkan 1.662.608 ekor, sementara budidaya ikan hias turut menyumbang 102.840 ekor, serta produksi garam mencapai 9.234 ton. Angka-angka ini memperlihatkan bahwa kegiatan perikanan tangkap masih menjadi tulang punggung utama, meskipun sektor budidaya juga berkembang pesat.

Dari sisi profesi, terdapat 104.488 orang nelayan dan 85.915 orang pembudidaya ikan, menunjukkan keterlibatan masyarakat yang luas dalam sektor ini. Data lain juga memperlihatkan adanya 62.600 orang yang tercatat dalam program *Kusuka* (2024) serta 27.787 unit kapal yang beroperasi pada 2023. Secara keseluruhan, data ini menegaskan besarnya kontribusi sumber daya kelautan dan perikanan Aceh, baik dalam penyediaan bahan pangan, penciptaan lapangan kerja, maupun penggerak ekonomi lokal. Namun, potensi besar ini juga menuntut adanya pengelolaan berkelanjutan agar tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga menjaga kelestarian sumber daya laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Gambar 1. Produksi Perikanan Tangkap Provinsi Aceh Berdasarkan Jumlah dan Jenis



Sumber : portaldata.kkp.go.id

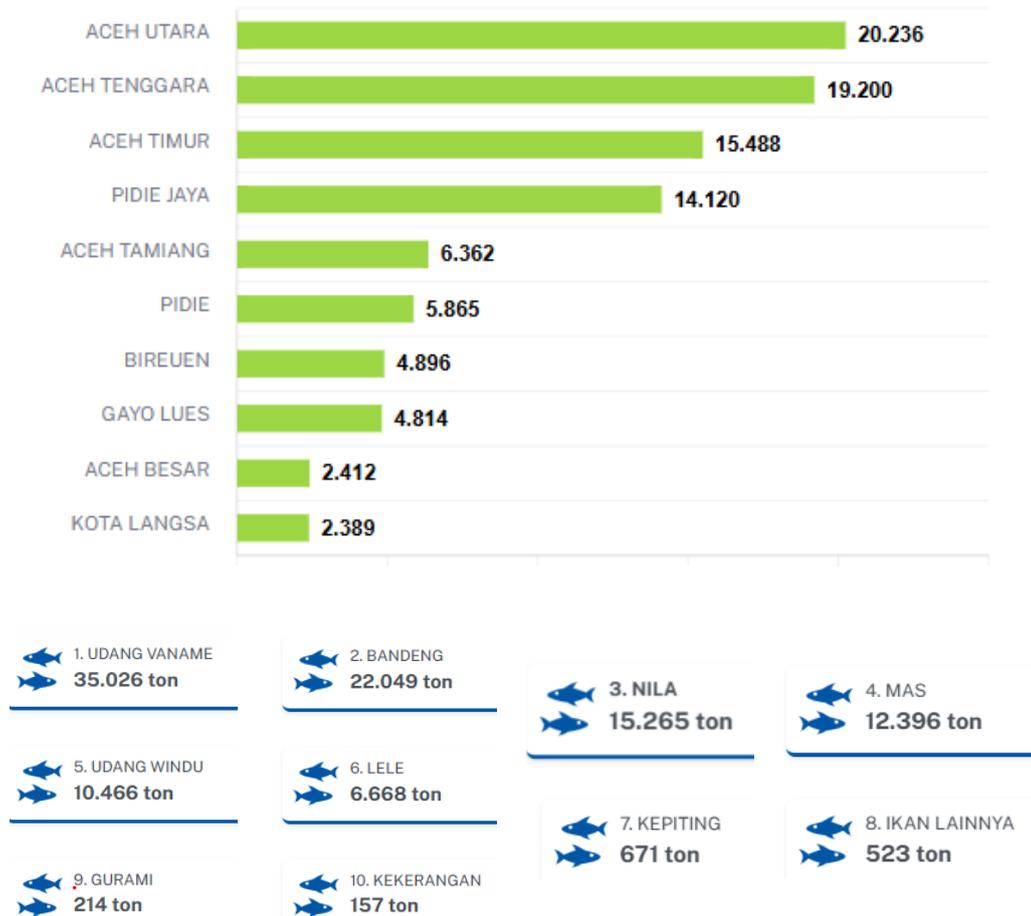
Gambar diatas menunjukkan Analisis data produksi perikanan tangkap di Provinsi Aceh menyajikan bukti empiris mengenai urgensi dan kompleksitas implementasi Program Pendataan Nasional dalam mencapai visi Indonesia Digital 2045. Fluktuasi tahunan yang signifikan dalam total produksi, yang ditandai dengan puncak tinggi pada tahun 2022 (324.618 Ton) dan penurunan pada tahun-tahun berikutnya, menunjukkan bahwa sektor ini sangat dinamis dan dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti iklim dan keberlanjutan sumber daya. Variabilitas ini secara kritis menguji aspek efektivitas dan ketepatan dari sistem Satu Data-KP. Keberhasilan program digitalisasi bergantung pada kemampuan teknologi untuk menangkap dan memvalidasi data real-time yang cepat berubah, bukan sekadar data statistik historis.

Lebih lanjut, grafik 10 besar daerah penghasil ikan tangkap menunjukkan adanya disparitas spasial yang tajam, di mana produksi tertinggi terkonsentrasi di beberapa kabupaten pesisir utama. Disparitas ini menimbulkan tantangan serius terhadap aspek pemerataan dan Kecukupan dari inisiatif digitalisasi. Untuk mewujudkan Indonesia Digital 2045 yang inklusif dan memberdayakan, Program Satu Data-KP harus bergerak melampaui pengumpulan data total dan berfokus pada transformasi digital di tingkat grassroots. Data ini menjadi cerminan bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk mengidentifikasi dan mengisi kesenjangan literasi digital serta infrastruktur teknologi di wilayah-wilayah dengan produksi rendah. Oleh karena itu, kegagalan program digitalisasi dalam menanggapi kompleksitas dinamis dan ketimpangan geografis ini akan menghambat kemampuan pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang efisien, responsif, dan adil bagi seluruh komunitas nelayan di Aceh

Gambar 2. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Pembesaran) Berdasarkan Jumlah dan Jenis



Provinsi : Aceh Tahun: 2023

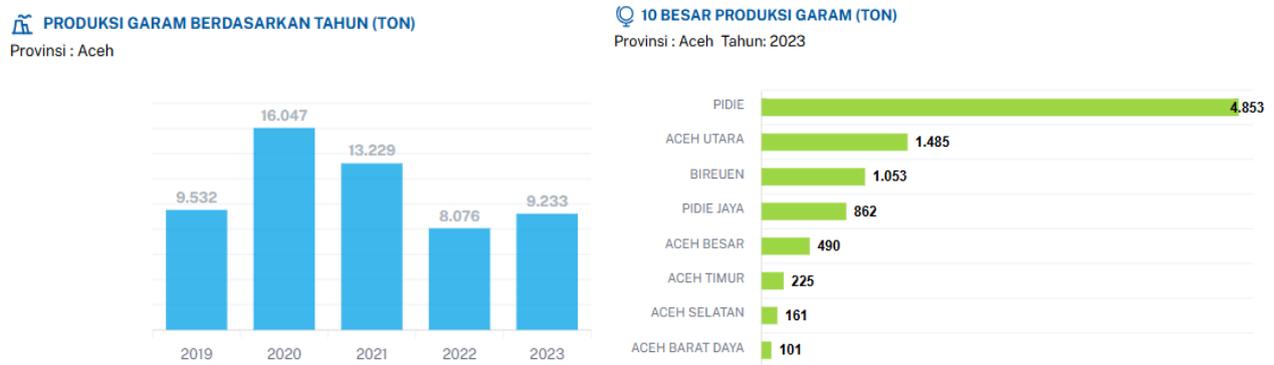
Sumber : portaldata.kkp.go.id

Gambar diatas menunjukkan adanya isu struktural yang menghambat pertumbuhan sektor ini, ditandai dengan tren penurunan produksi yang konsisten sejak mencapai puncaknya pada tahun 2020 hingga 2023 (turun menjadi 103.815 Ton). Penurunan stabil ini secara kritis menantang kapabilitas Program Pendataan Nasional (seperti Satu Data-KP) karena menuntut sistem data yang mampu melampaui pencatatan kuantitas akhir; sistem tersebut harus sanggup mengintegrasikan data rantai nilai (input benih, pakan, dan kesehatan lingkungan) untuk menyediakan analisis prediktif dan *early warning system*.

Kegagalan dalam menyediakan informasi real-time ini menghambat kemampuan pemerintah dan pembudidaya dalam memitigasi risiko struktural (seperti wabah penyakit atau kenaikan harga pakan). Selain itu, konsentrasi produksi yang tidak merata di beberapa wilayah menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dalam investasi dan pemberdayaan. Untuk mewujudkan visi Indonesia Digital 2045 yang inklusif, Program Satu Data-KP wajib berfungsi sebagai katalisator pemberdayaan digital, tidak hanya mencatat data, tetapi juga memfasilitasi

akses digital untuk literasi, modal, dan pemasaran bagi kelompok pembudidaya di daerah dengan produksi rendah, sehingga mengatasi keterbatasan transformasi digital dan minimnya kesiapan masyarakat yang masih menjadi hambatan fundamental

Gambar 3. Produksi Garam di Provinsi Aceh Tahun 2023



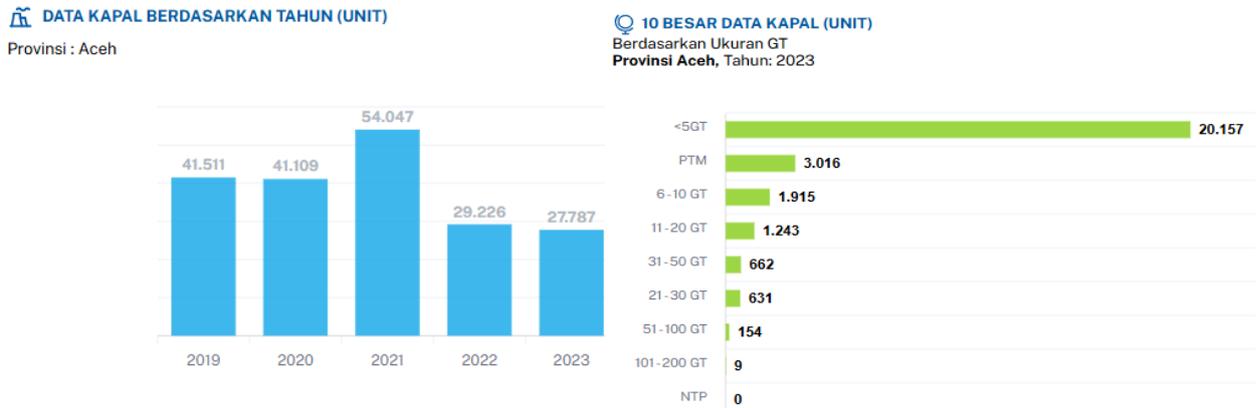
Sumber : portaldata.kkp.go.id

Analisis data produksi garam di Provinsi Aceh menyoroti volatilitas tinggi dan disparitas geografis yang ekstrem, yang secara kritis menguji kapabilitas sistem pendataan nasional, seperti Program Satu Data-KP. Grafik tahunan menunjukkan produksi garam mencapai puncak tertinggi pada tahun 2020 (16.047 Ton), namun mengalami penurunan tajam di tahun 2022 (8.076 Ton) sebelum sedikit meningkat kembali pada tahun 2023. Fluktuasi signifikan ini, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor musim, cuaca, dan infrastruktur panen, menuntut sistem pendataan yang sangat responsif dan fleksibel agar dapat memberikan data yang akurat untuk perencanaan stok dan kebijakan harga. Kegagalan sistem digital dalam menangkap dinamika musiman ini akan menyebabkan keputusan kebijakan yang terlambat dan tidak tepat sasaran.

Lebih lanjut, grafik 10 besar daerah penghasil garam menunjukkan konsentrasi produksi yang sangat ekstrem dan tidak merata. Kabupaten Pidie mendominasi secara absolut dengan produksi 4.853 Ton, yang secara signifikan jauh melampaui daerah lain seperti Aceh Utara (1.485 Ton) dan Bireuen (1.053 Ton). Konsentrasi ini mengindikasikan bahwa investasi, ketersediaan lahan, dan teknologi produksi garam masih sangat terpusat. Bagi upaya menuju Indonesia Digital 2045, data ini menantang aspek pemerataan program digitalisasi. Sistem Satu Data-KP harus digunakan tidak hanya untuk mencatat output, tetapi sebagai instrumen untuk mengidentifikasi hambatan struktural di wilayah produksi rendah. Tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa inisiatif digital (seperti informasi harga pasar atau akses ke modal) dapat

merata dan memberdayakan seluruh petani garam kecil, bukan hanya mereka yang berada di klaster produksi yang dominan

Gambar 4. Data Kapal Provinsi Aceh



Sumber : portaldata.kkp.go.id

Gambar diatas menunjukkan adanya dinamika yang tajam dalam ketersediaan unit dan dominasi kapal berskala kecil, yang keduanya menantang validitas dan inklusivitas program pendataan digital nasional, seperti Program Satu Data-KP. Grafik historis menunjukkan fluktuasi ekstrem dalam jumlah unit kapal, mencapai puncak di tahun 2021 (54.047 unit) sebelum mengalami penurunan drastis hingga tahun 2023 (27.787 unit). Volatilitas yang signifikan ini mencerminkan potensi deregistrasi, kerusakan, atau faktor regulasi menuntut sistem Satu Data yang sangat Responsif dan memiliki mekanisme verifikasi cepat (validasi real-time) untuk memastikan data inventaris kapal yang digunakan dalam perencanaan subsidi atau alokasi sumber daya adalah akurat.

Kegagalan sistem digital untuk menangkap penurunan armada yang mendadak ini dapat menyebabkan keputusan kebijakan yang tidak efisien. Secara fundamental, struktur armada perikanan Aceh dicirikan oleh dominasi mutlak kapal kecil (<5 GT), yang berjumlah 20.157 unit pada tahun 2023, jauh melampaui gabungan kapal ukuran menengah hingga besar. Konsentrasi pada kapal skala kecil ini menyoroti bahwa implementasi program pendataan digital harus secara khusus mengatasi tantangan literasi digital dan aksesibilitas teknologi di tingkat nelayan tradisional. Kapasitas digital yang terbatas pada armada kecil ini merupakan hambatan utama terhadap aspek perataan dari Indonesia Digital 2045, memerlukan intervensi kebijakan yang fokus pada digitalisasi on-site yang sederhana dan terjangkau untuk memastikan sektor perikanan rakyat terintegrasi sepenuhnya.

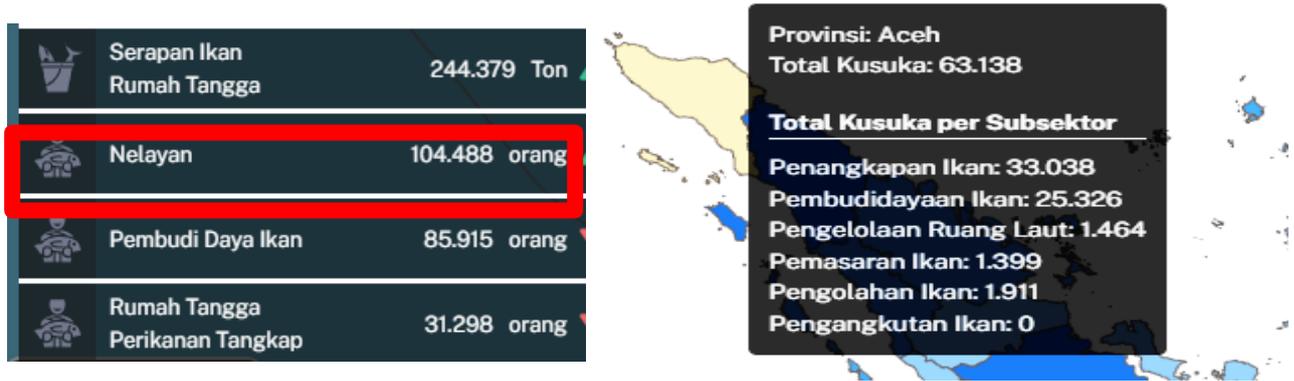
Data yang tersedia pada portal KKP cukup beragam dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan baik oleh Pemerintah dalam mengambil keputusan maupun bagi masyarakat umum yang ingin mengawasi perkembangan atau melakukan penelitian. Namun, berbicara pendataan tentunya tidak hanya selesai pada proses penginputan data semata melainkan data yang telah tersedia harus senantiasa dijaga validitas dan reliabilitasnya melalui kegiatan pembaharuan yang dilakukan secara berkelanjutan. Hal tersebut dikarenakan kuantitas dan kualitas data merupakan hal yang sangat mendasar di era digital agar pemanfaatan data dapat dilakukan secara optimal (Filgueiras & Raymond, 2023; Löfgren & Webster, 2020).

D. Pembahasan Penelitian

Indonesia Digital 2045 merupakan visi yang menitikberatkan pada 3 nilai pokok yakni inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan. Visi ini dibangun atas dasar pemerataan pembangunan digital yang melibatkan semua pihak tanpa ada yang tertinggal. Berdasarkan hasil penelitian, penulis mendapatkan beberapa kekurangan fundamental dalam program pendataan nasional Satu Data-KP yang menghadirkan jurang besar dalam upaya meraih Indonesia Digital sebagaimana yang dicita-citakan.

Temuan penulis di lapangan menyatakan bahwa tingkat kesenjangan digital (digital divide) nelayan khususnya di daerah terpencil masih sangat tinggi. Hal ini menyebabkan petugas pendataan seringkali harus melakukan penginputan data secara mandiri dan pada beberapa kasus petugas ikut mengelola akun Satu Data-KP milik masyarakat (atas permintaan masyarakat). Asistensi semacam ini tentunya dapat mempercepat proses pendataan, namun hal tersebut justru dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru berupa minimnya kesadaran masyarakat untuk beradaptasi di era digitalisasi yang akan menimbulkan dampak jangka panjang terkait keberlanjutan (Isabella et al., 2024; Xia et al., 2021)

Minimnya pelatihan dan sosialisasi terkait penggunaan Satu Data-KP menjadikan masyarakat kurang teredukasi dalam pemanfaatan sistem digitalisasi sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya pendataan era digital masih sangat minim. Sebagai contoh, pada aspek pendataan Kartu KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan), dari 104.488 Nelayan yang terdata hanya 63.138 diantaranya yang memiliki kartu KUSUKA. Padahal, Kartu KUSUKA sangat penting untuk dimiliki sebagai kartu identitas dasar bagi para pelaku di bidang Kelautan dan Perikanan.

Gambar 5. Perbandingan Jumlah Nelayan dan Pemilik KUSUKA

Sumber : portaldata.kkp.go.id

Salah seorang masyarakat yang penulis wawancarai menyatakan “Saya sudah dari dulu memiliki kartu KUSUKA yang katanya untuk pendataan, namun sampai saat ini saya tidak pernah merasakan manfaat apapun dari adanya pendataan tersebut. Justru yang merasakan manfaatnya adalah orang lain dalam artian walaupun ada manfaat seperti adanya bantuan namun tidak tepat sasaran”.

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa upaya peningkatan pemahaman masyarakat terkait program pendataan nasional sangat diperlukan dikarenakan sebagian besar masyarakat awam selama ini beranggapan bahwa program pendataan bertujuan untuk pemberian bantuan semata. Padahal, banyak tujuan lain seperti sarana perlindungan dan asuransi, hingga perizinan dan administrasi. Oleh sebab itu, upaya untuk mengedukasi masyarakat harus ditingkatkan. Harapannya, dengan adanya peningkatan pemahaman maka kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi secara penuh dalam program pendataan nasional juga dapat meningkat, agar terciptanya program pendataan yang lebih efektif, inklusif, dan memberdayakan (El Khatib et al., 2022; Bharosa et al., 2021)

Penggunaan sistem digitalisasi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi. Pada program Satu Data-KP, pemerintah menggunakan website sebagai sarana utama. Penggunaan website dalam mengumpulkan dan menyebarkan data merupakan salah satu bentuk layanan berbasis digital yang terbukti mampu memberikan banyak sekali manfaat baik dari segi efektifitas dan efisiensi (Sarwar et al., 2023; Li & Liu, 2022; Krasnykov et al., 2024), serta transparansi dan akuntabilitas kinerja (Sofyani et al., 2020). Dengan menggunakan website, petugas akan sangat dimudahkan sehingga tidak perlu mengumpulkan dan menganalisis banyak berkas fisik. Namun dalam hal ini, penulis menyoroti bahwa media kertas

(berkas fisik) dalam proses pendataan masih digunakan secara masif contohnya kuesioner pendataan. Hal tersebut tentunya perlu diminimalisir dikarenakan salah satu karakteristik utama dari penerapan sistem digitalisasi adalah paperless yang berarti pengurangan penggunaan media kertas seminim mungkin untuk menekan biaya dan meningkatkan efisiensi (Clarke, 2020). Dengan kata lain, jika media kertas masih digunakan secara masif maka upaya pencapaian sistem pemerintahan Indonesia berbasis digitalisasi masih sulit diraih.

Oleh sebab itu, transformasi menuju digitalisasi harus dilakukan dari hulu hingga hilir dengan mulai memangkas setiap proses konvensional dan mengganti dengan proses-proses berbasis digitalisasi (Scupola & Mergel, 2022) agar visi Indonesia Digital 2045 dapat benar-benar tercapai tentunya melalui upaya yang bertahap dan sistematis.

Hadirnya program pendataan Satu Data-KP sejauh ini sudah memberikan dampak positif dalam upaya pengintegrasian data nasional secara terpadu. Pendataan yang sebelumnya dikelola secara terpisah kini sudah terhimpun pada satu pusat data di tingkat kementerian sehingga menghadirkan kemudahan akses terhadap data yang dibutuhkan. Namun, penghimpunan data secara masif tersebut menimbulkan pertanyaan umum terkait langkah selanjutnya/upaya peningkatan dan perbaikan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dengan memanfaatkan data yang ada. Pemerataan pembangunan, kesetaraan ekonomi dan keadilan, serta kesejahteraan Nelayan masih menjadi tantangan utama pada sektor Kelautan dan Perikanan yang harus segera diselesaikan agar tidak terbentuk stigma negatif dari masyarakat perihal mekanisme program pendataan nasional yang tidak berguna sehingga akan berdampak langsung terhadap tingkat partisipasi dan kepercayaan masyarakat pada program-program pemerintah selanjutnya (Mishra & Attri, 2020; Engen et al., 2021)

Pokok permasalahan pendataan nasional bukan hanya bersumber dari aspek kesadaran masyarakat saja, namun latar belakang sosial ekonomi, hingga infrastruktur digital yang memadai juga sangat mempengaruhi (Xu & Tang, 2020). Saat melakukan wawancara, penulis mengamati bahwa masih banyak masyarakat yang belum memiliki perangkat Smartphone sebagai sarana dasar untuk mengakses program yang berbasis digitalisasi. Disamping itu, akses internet di Provinsi Aceh juga belum sepenuhnya merata. Sampai saat ini masih terdapat daerah yang belum terjangkau jaringan internet (blank spot) seperti beberapa desa di Kabupaten Aceh Tengah diantaranya desa Konyel, Arul Gading, Bergang, Kekuyang/Semelit, Jeget Ayu, Kerawang, Tirmiara, Pilar Jaya, Tanjung, Pante Bener, Karang Ampar, Linge, Ise-Ise, Lumut,

Penarun, Umang, Kemerleng, Angkup, Merah Said, Arul Pertik, dan Gajah Putih (TribunGayo, 2024). Kondisi ini tentunya semakin memperparah kesenjangan digital yang terjadi sehingga sangat berpengaruh terhadap kualitas pemerataan dari program Satu Data-KP.

Program ini sudah menyediakan basis data yang cukup menggambarkan kondisi lapangan secara universal. Salah satu dampak utama yang dihadirkan dari hal tersebut adalah penyederhanaan sistem administrasi. Sebagian besar masyarakat yang penulis wawancarai memberikan respon positif terkait kemudahan administrasi yang dihadirkan melalui program Satu Data-KP, meskipun beberapa diantara mereka masih belum mampu memanfaatkan inovasinya secara langsung. Salah seorang Nelayan di Aceh Barat menyampaikan “Sekarang semuanya sudah sangat mudah dan cepat, keperluan cepat terselesaikan asalkan syarat-syarat yang diperlukan dilengkapi. Selain itu, sistem yang berlaku sekarang sangat memudahkan nelayan yaitu petugas turun langsung ke lapangan untuk mendata, kalau dulu nelayan mengurus keperluan sendiri dan harus berhubungan langsung dengan beberapa instansi seperti pemerintah gampong dan DKP. Hal tersebut sangat melelahkan”.

Penyederhanaan sistem administrasi memang merupakan salah satu kemewahan yang ditawarkan oleh sistem berbasis digitalisasi. Selain itu, hal tersebut juga sangat sesuai dengan visi Indonesia Digital 2045 yang menekankan pentingnya modernisasi sistem administrasi guna meningkatkan efisiensi.

Kehadiran program Satu Data-KP ditengah berbagai polemik pendataan nasional seperti disintegrasi data dan ketidakjelasan pengelolaan serta penyimpanan data dirasa sudah sangat tepat untuk mengatasi persoalan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dan skala prioritas. Ditinjau dari segi pendataan, program ini sudah dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar kelompok masyarakat yang memiliki profesi di bidang Kelautan dan Perikanan. Sebagai contoh, kehadiran program Satu Data-KP dapat membantu tingkat ketepatan sasaran dari program pemberian bantuan pemerintah seperti pengadaan kapal/alat bantu perikanan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa peningkatan komitmen pejabat dalam mengembangkan sektor Kelautan dan Perikanan khususnya dalam hal penambahan ketersediaan bantuan sangat diperlukan. Selain itu, upaya untuk mempersiapkan infrastruktur/sarana prasarana digital guna meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam sistem berbasis digitalisasi juga harus terus dilaksanakan.

E. Kesimpulan

Program Satu Data-KP sudah menunjukkan capaian yang baik jika dianalisis dari fungsi pendataan yang sesuai dengan tujuan penghimpunan, pengintegrasian, serta keterbukaan data di mana hal tersebut dapat diamati langsung dari portal Satu Data Kelautan dan Perikanan. Namun jika dikaitkan dengan upaya menuju Indonesia Digital 2045, terdapat beberapa aspek tertentu yang masih membutuhkan peningkatan. Sebagai contoh, pemerintah perlu memperhatikan kembali tujuan fundamental dari inovasi digital khususnya pada aspek inklusivitas, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Pemerintah seharusnya tidak hanya berperan sebagai “pengumpul data” semata, namun juga menjadi edukator dan fasilitator yang baik dalam menciptakan masyarakat yang siap di era digital. Disamping itu, data yang sudah ada seharusnya dapat memantik komitmen pemerintah untuk lebih serius dalam memperhatikan peningkatan kesejahteraan pada sektor Kelautan dan Perikanan melalui penyediaan berbagai bantuan serta sarana pendukung yang semakin tepat sasaran sebagaimana harapan masyarakat dari adanya program Satu Data-KP. Berdasarkan indikator evaluasi kebijakan, program Satu Data-KP sudah menunjukkan tingkat efektivitas, kecukupan, responsivitas dan ketepatan yang cukup baik, namun program ini masih memiliki permasalahan utama terkait efisiensi dan pemerataan dikarenakan penggunaan sumber daya yang kurang tepat serta masih terdapat beberapa pihak yang disconnected, dalam artian belum mampu berpartisipasi secara langsung dalam pemanfaatan sistem Satu Data-KP.

Referensi

- Agostino, D., Arnaboldi, M., & Lema, M. D. (2021). New development: COVID-19 as an accelerator of digital transformation in public service delivery. *Public Money & Management*, 41(1), 69-72.
- Bharosa, N., Marangio, F., Petti, C., & Janssen, M. (2021, October). Engaging citizens in digital public service innovation ecosystems-insights from the Netherlands and Italy. In *Proceedings of the 14th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance* (pp. 509-512).
- Clarke, A. (2020). Digital government units: what are they, and what do they mean for digital era public management renewal?. *International Public Management Journal*, 23(3), 358-379.

- El Khatib, M., AlMaeni, A., & Alkamali, W. (2022). The relation between effective digital program governance and program success. *American Journal of Industrial and Business Management*, 12(9), 1402-1418.
- Engen, M., Fransson, M., Quist, J., & Skålén, P. (2021). Continuing the development of the public service logic: a study of value co-destruction in public services. *Public Management Review*, 23(6), 886-905.
- Filgueiras, F., & Raymond, A. (2023). Designing governance and policy for disruptive digital technologies. *Policy Design and Practice*, 6(1), 1-13.
- Isabella, I., Alfitri, A., Saptawan, A., Nengyanti, N., & Baharuddin, T. (2024). Empowering Digital Citizenship in Indonesia: Navigating Urgent Digital Literacy Challenges for Effective Digital Governance. *Journal of Governance and Public Policy*, 11(2), 142-155.
- Krasnykov, Y., Ninyuk, I., Storozhenko, L., Marukhlenko, O., & Kruhlov, V. (2024). Impact of digital public services on governance efficiency. *Revista De Estudios Interdisciplinarios En Ciencias Sociales/Journal of Interdisciplinary Studies in Social Sciences*, 26, 35-51.
- Li, B., & Liu, Y. (2022). A study on the impact of digital transformation of government governance on the efficiency of public services: Experience data from the information for people national pilot cities. *Frontiers in Business, Economics and Management*, 5(2), 22-26.
- Löfgren, K., & Webster, C. W. R. (2020). The value of Big Data in government: The case of 'smart cities'. *Big Data & Society*, 7(1), 2053951720912775.
- Mishra, J., & Attri, V. (2020). Governance, public service delivery and trust in government. *Studies in Indian Politics*, 8(2), 186-202.
- Mutiarin, D., Khaerah, N., Nyssa, A. V. I., & Nasrulhaq, N. (2024). E-Government Development: Catalysing Agile Governance Transformation in Indonesia. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, 5(1), 87-110.
- PerMen-KP NO. 67 Tahun 2017; diperbaharui menjadi PerMen-KP Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan
- Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
- Perpres No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Pittaway, J. J., & Montazemi, A. R. (2020). Know-how to lead digital transformation: The case of local governments. *Government information quarterly*, 37(4), 101474.

- Rachmawati, R., Choirunnisa, U., Pambagyo, Z. A., Syarafina, Y. A., & Ghiffari, R. A. (2021). Work from Home and the Use of ICT during the COVID-19 Pandemic in Indonesia and Its Impact on Cities in the Future. *Sustainability*, 13(12), 6760.
- Roadmap Indonesia Digital 2045
- Roadmap Making Indonesia 4.0
- Sarwar, M. I., Abbas, Q., Alyas, T., Alzahrani, A., Alghamdi, T., & Alsaawy, Y. (2023). Digital transformation of public sector governance with IT service management—A pilot study. *IEEE Access*, 11, 6490-6512.
- Scupola, A., & Mergel, I. (2022). Co-production in digital transformation of public administration and public value creation: The case of Denmark. *Government Information Quarterly*, 39(1), 101650.
- Sofyani, H., Riyadh, H. A., & Fahlevi, H. (2020). Improving service quality, accountability and transparency of local government: The intervening role of information technology governance. *Cogent Business & Management*, 7(1), 1735690.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet 1. Bandung: Alfabeta.
- Tresiana & Duadji. (2019). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Cet 1. Bandarlampung. Graha Ilmu
- TribunGayo.com (2024). 22 Desa di Aceh Tengah Masih Belum Terjangkau Internet, Diskominfo Usulkan Penambahan Tower. Diakses pada 30 Desember 2021, dari <https://gayo.tribunnews.com/2024/05/30/22-desa-di-aceh-tengah-masih-belum-terjangkau-internet-diskominfo-usulkan-penambahan-tower?page=2>
- Xia, Z., Yan, X., & Yang, X. (2022). Research on big data-driven public services in China: a visualized bibliometric analysis. *Journal of Chinese Governance*, 7(4), 531-558.
- Xu, C. K., & Tang, T. (2020). Closing the gap or widening the divide: The impacts of technology-enabled coproduction on equity in public service delivery. *Public administration review*, 80(6), 962-975.